

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dari kenaikan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto), berkurangnya angka pengangguran, rendahnya tingkat kemiskinan, semakin kecilnya ketimpangan pendapatan, dan tersedianya lapangan kerja.

“Tujuan negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dengan sasaran meningkatkan persediaan dan pemerataan kebutuhan pokok masyarakat, meningkatkan taraf hidup dengan cara meningkatkan pendapatan, penyediaan lapangan kerja, pemerataan pendidikan, nilai-nilai budaya, dll (Sunusi dkk, 2014).”

Begitu juga dengan Provinsi Kalimantan Barat oleh karena itu pemerintah berusaha melakukan pembangunan di berbagai bidang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pelaksanaan pembangunan tersebut difokuskan pada pembangunan daerah, di mana pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.

“Pembangunan secara lebih luas dapat diartikan sebagai usaha untuk lebih meningkatkan produktivitas sumber daya potensial yang dimiliki oleh suatu negara, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, kapital atau modal maupun sumber daya berupa teknologi, dengan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Todaro, 2000).”

Pertumbuhan ekonomi adalah bagian penting dari pembangunan suatu negara, bahkan bisa dikatakan sebagai salah satu indikator penting untuk menjelaskan bahwa suatu daerah atau Provinsi itu mampu secara finansial atau

sejahtera. Keberhasilan tidak akan terlihat tanpa adanya hasil riil berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu juga tanpa pertumbuhan ekonomi maka pembangunan suatu daerah/Provinsi tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Pada kondisi ini, meningkatnya dana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagaimana diketahui bahwa masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Di samping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk, dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah keterampilan mereka.

Keberhasilan Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tidak dapat dipisahkan dari meningkatnya investasi. Investasi merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan laju pertumbuhan ekonomi, karena disamping akan mendorong kenaikan output secara signifikan, juga secara otomatis akan meningkatkan jumlah input yang diminta, sehingga pada gilirannya akan meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsekuensi dari meningkatnya pendapatan yang diterima masyarakat.

Data pada tabel menunjukkan realisasi investasi swasta menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2013.

Tabel 1.1
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Menurut
kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2010-2013 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Kab. Sambas	176.431	215.961	372.767	534.496
Kab. Bengkayang	106.991	106.991	370.442	370.442
Kab. Landak	6.131	6.131	6.131	6.131
Kab. Pontianak	1.154.025	1.235.546	2.679.652	2.679.652
Kab. Sanggau	2.010.045	2.233.564	2.253.211	3.623.884
Kab. Ketapang	1.701.380	2.313.366	2.899.871	3.394.454
Kab. Sintang	1.607.043	1.671.117	1.781.727	2.009.905
Kab. Kapuas Hulu	1.424.480	2.037.428	2.993.519	3.679.436
Kab. Melawi	930	930	930	930
Kota Pontianak	194.285	194.303	563.924	563.924
Kalimantan Barat	8.381.741	10.015.337	13.922.175	16.863.254

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Pada Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa, realisasi investasi yang masuk untuk Kabupaten Sanggau lebih besar dibandingkan dengan 9 Kabupaten/Kota lainnya yaitu sebesar 2.010.046 juta rupiah pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 3.623.884 juta rupiah di tahun 2013. Selain Sanggau, Ketapang juga merupakan Kabupaten dengan jumlah realisasi investasi swasta terbesar yaitu sebesar 1.701.380 juta rupiah pada tahun 2010 dan meningkat menjadi 3.394.454 juta rupiah pada tahun 2013. Jumlah investasi yang terus meningkat setiap tahunnya pada Kabupaten Sanggau dan Kabupaten Ketapang dikarenakan dua kabupaten ini

memiliki sumber daya alam yang potensial dan dapat menjadi modal dalam meningkatkan pembangunan suatu daerah. Jumlah realisasi investasi swasta yang masuk di Kabupaten Melawi dari tahun 2010-2013 sebesar 930 juta rupiah dan jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan dengan 9 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat, ini berarti jumlah investasi yang masuk ke Kabupaten Melawi dan hanya mampu bertahan pada jumlah tersebut. Selain Kabupaten Melawi, Kabupaten Landak merupakan Kabupaten dengan dana investasi yang masuk hanya sebesar 6.131 juta rupiah. Jumlah investasi yang tidak mengalami peningkatan pada Kabupaten Melawi dan Kabupaten Landak dikarenakan tidak adanya investasi yang masuk dari pemerintah maupun swasta.

Pertumbuhan penduduk dan tenaga kerja dianggap sebagai faktor positif yang merangsang pertumbuhan ekonomi. Pada dasarnya penduduk dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu penduduk yang termasuk dalam kelompok angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Penduduk yang bertambah akan memperbesar jumlah tenaga kerja dan penambahan tersebut memungkinkan suatu daerah untuk menambah produksi. Jumlah tenaga kerja pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang terserap sejak 4 tahun terakhir dari tahun 2010-2013 menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya, tetapi hal ini menunjukkan masih kecilnya jumlah terserapnya angkatan kerja yang bekerja yang ada pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini di tunjukkan dengan makin besarnya jumlah bukan angkatan kerja disetiap tahunnya pada 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Hal ini disebabkan kurangnya pendidikan serta permasalahan sosial seperti pengangguran, dan kemiskinan yang berakibat pada lambatnya prospek pertumbuhan dan pembangunan di Kalimantan Barat.

Menurut Todaro (2003) pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan Angkatan Kerja (AK) secara tradisional dianggap sebagai salah satu faktor positif yang memacu pertumbuhan ekonomi. Jumlah tenaga kerja yang lebih besar berarti akan menambah tingkat produksi, dan hal ini akan berpengaruh terhadap daya beli tenaga kerja tersebut sedangkan pertumbuhan penduduk yang lebih besar berarti ukuran pasar domestiknya lebih besar. Meski demikian hal tersebut masih dipertanyakan apakah benar laju pertumbuhan penduduk yang cepat benar-benar akan memberikan dampak positif atau negatif dari pembangunan ekonominya.

Modal pembangunan yang penting selain investasi adalah sumber daya manusia. Partisipasi aktif dari seluruh masyarakat akan mempercepat pembangunan daerah karena rasa kepemilikan yang lebih besar terhadap daerah. Hasil yang dicapai dalam pembangunan juga akan lebih cepat dirasakan untuk daerah sendiri sehingga nantinya dapat merangsang kesadaran masyarakat membangun wilayah lokal masing-masing sehingga sumber daya yang ada pada daerah dapat tergali dengan maksimal tanpa ada campur tangan dari tenaga kerja luar daerah atau tenaga kerja asing. Untuk mendukung pelaksanaan pembangunan memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas agar dalam pembangunan daerah bisa lebih banyak menyerap tenaga kerja lokal disamping terpenuhinya

kuantitas permintaan tenaga kerja. Hal ini akan berpengaruh positif untuk pembangunan daerah sehingga akan menciptakan kemandirian suatu daerah untuk mengolah sumber daya alam yang ada dengan tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas tanpa campur tangan dari pihak luar seperti tenaga kerja asing. Data pada tabel menunjukkan jumlah tenaga kerja menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2010-2013.

Tabel 1.2.
Penduduk Usia 15 Tahun ke atas yang bekerja Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2013 (Jiwa)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013
Kab. Sambas	325.231	324.014	328.066	322.144
Kab. Bengkayang	101.452	107.244	104.394	107.894
Kab. Landak	155.545	166.984	154.709	154.709
Kab. Pontianak	321.906	357.203	320.073	296.599
Kab. Sanggau	302.664	305.517	305.929	302.115
Kab. Ketapang	245.121	260.968	253.796	242.687
Kab. Sintang	187.981	183.647	198.331	189.537
Kab. Kapuas Hulu	119.142	117.053	114.458	111.252
Kab. Melawi	96.087	91.824	94.957	92.919
Kota Pontianak	240.576	232.118	231.801	234.840
Kalimantan Barat	2.095.705	2.146.572	2.106.514	2.054.696

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa Kabupaten Sambas memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat sebanyak 325.231 jiwa pada tahun 2010 namun pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sambas turun menjadi 322.144 jiwa. Turunnya jumlah

tenaga kerja di Kabupaten Sambas ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Selain Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak juga memiliki jumlah tenaga kerja terbanyak yaitu sebanyak 321.906 jiwa pada tahun 2010 dan turun menjadi 296.599 jiwa pada tahun 2013. Sama halnya dengan penyebab penurunan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Sambas, salah satu faktor yang menyebabkan menurunnya jumlah tenaga kerja adalah bertambahnya jumlah penduduk yang bersekolah dan mengurus rumah tangga. Sedangkan kabupaten dengan jumlah tenaga kerja terkecil adalah Kabupaten Melawi dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 96.087 jiwa karena angkatan kerja di Kabupaten Melawi lebih banyak yang bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Penanaman modal dalam negeri pada kabupaten/kota di Kalimantan Barat dianggap faktor positif yang dapat menyerap tenaga kerja di setiap kabupaten karena dengan semakin bertambahnya investasi dalam negeri semakin banyak pula tenaga kerja yang dibutuhkan dan hal ini akan berdampak positif terhadap tingkat produksi.

Tabel 1.3.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan\ 2000
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2013 (Juta Rp)

Kabupaten/Kota	Tahun			
	2010	2011	2012	2013*
Kab. Sambas	4.161.867	4.411.511	4.674.993	4.960.263
Kab. Bengkayang	1.166.187	1.232.062	1.302.744	1.381.376
Kab. Landak	1.604.103	1.714.766	1.818.228	1.931.082
Kab. Pontianak	6.157.479	6.538.140	6.935.249	7.383.560
Kab. Sanggau	3.335.840	3.497.076	3.704.413	3.933.244
Kab. Ketapang	3.228.220	3.476.955	3.655.633	3.905.673
Kab. Sintang	2.086.074	2.199.676	2.327.768	2.475.239
Kab. Kapuas Hulu	1.182.106	1.236.014	1.305.362	1.383.779
Kab. Melawi	536.448	571.517	609.105	650.096
Kota Pontianak	6.621,194	7.010.567	7.436.240	7.950.260
Kalimantan Barat	23.458.325,04	31.888.283,28	33.769.734,31	35.954.571,66

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat.

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa Kota Pontianak memberikan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu sebesar 6.621.194 juta rupiah pada tahun 2010, dan mengalami peningkatan hingga 7.950.260 juta rupiah pada tahun 2013. Hal ini dikarenakan besarnya kontribusi yang disumbangkan setiap sektor yang ada di Kota Pontianak untuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Pontianak. Selain Kota Pontianak, Kabupaten Pontianak juga memberikan kontribusi terbesar pada PDRB yaitu sebesar 6.157.479 pada tahun 2010 dan terus meningkat sebesar 7.383.650 pada tahun 2013. Sama halnya dengan Kota Pontianak, terus meningkatnya Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) ini dikarenakan besarnya kontribusi setiap sektor di Kabupaten Pontianak dalam meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pontianak. Sedangkan kabupaten yang memberikan kontribusi terkecil adalah Kabupaten Melawi dengan

jumlah kontribusi hanya sebesar 536.448 pada tahun 2010 meskipun pada tahun 2013 kontribusinya bertambah sebesar 650.096 tetapi dibandingkan 9 kabupaten/kota lainnya jumlah ini tentunya sangat jauh lebih kecil.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa tingkat investasi dan tenaga kerja mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Apabila nilai dari masing-masing variabel meningkat maka peningkatan juga terjadi pada pertumbuhan ekonomi dalam hal ini adalah PDRB. Apabila terjadi penurunan dari variabel-variabel tersebut penurunan juga terjadi terhadap PDRB, dari fenomena tersebut di atas maka perlu adanya suatu penelitian yang diharapkan dapat memberikan rekomendasi demi kelangsungan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Kalimantan Barat. Dalam penelitian ini studi kasus hanya dilakukan pada 10 Kabupaten/Kota dengan pertimbangan angka maka 4 kabupaten yang merupakan kabupaten pemekaran dikembalikan pada kabupaten awal.

Hal ini yang melatarbelakangi peneliti untuk mengambil dan meneliti lebih lanjut mengenai **“Analisis Pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Dan Tenaga Kerja Terhadap Peningkatan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat (Studi Kasus 10 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang diambil sebagai kajian yang akan dilakukan dalam penelitian adalah “Apakah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja berpengaruh terhadap Peningkatan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja terhadap Peningkatan PDRB di Provinsi Kalimantan Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Harapan dari penelitian ini adalah dapat bermanfaat antara lain :

1. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai bagaimana pengaruh pengeluaran Pemerintah maupun swasta dalam Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja terhadap peningkatan PDRB. Dan penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah maupun swasta dalam menentukan kebijakan untuk menanamkan modalnya pada suatu daerah.
2. Sebagai bahan informasi dan menambah literatur bagi pihak-pihak lain yang ingin mengadakan penelitian tentang pengaruh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan tenaga kerja terhadap peningkatan PDRB.